

## **“Implementasi Nilai-Nilai Kesetaraan Gender dalam Pembelajaran Sejarah dan Pengaruhnya terhadap Sikap Siswa di Sekolah Menengah Atas”**

**Nur Amalia<sup>1</sup>, Gugun Gunadi<sup>2</sup>**

[amaliana124@gmail.com](mailto:amaliana124@gmail.com), [gunadi@unida.ac.id](mailto:gunadi@unida.ac.id)

"

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan nilai-nilai kesetaraan gender dalam pembelajaran sejarah serta pengaruhnya terhadap sikap siswa di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Latar belakang penelitian didasari oleh kenyataan bahwa kurikulum sejarah masih banyak menekankan peran laki-laki, sementara kontribusi perempuan kerap terpinggirkan. Situasi tersebut berpotensi mempertahankan bias gender dan membentuk cara pandang yang tidak seimbang di kalangan peserta didik. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang dipadukan dengan studi literatur, penyebaran angket, dan wawancara mendalam. Analisis data dilakukan melalui uji-t (One Sample t-Test) serta desain kuasi-eksperimen untuk menilai dampak integrasi perspektif gender dalam pembelajaran sejarah terhadap perubahan sikap siswa. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa penerapan nilai-nilai kesetaraan gender dapat memperluas pemahaman siswa mengenai peran laki-laki dan perempuan secara lebih seimbang, sekaligus menumbuhkan sikap egaliter, kritis, dan toleran. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi hambatan, antara lain keterbatasan pengetahuan guru, kurangnya ketersediaan materi ajar, serta dominasi budaya patriarkal. Dengan demikian, penelitian ini menekankan bahwa pembelajaran sejarah yang berorientasi gender berkontribusi penting dalam membangun kesadaran kritis siswa serta mendukung terwujudnya pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

Kata Kunci : Nilai Kesetaraan, Gender, Sejarah, Toleransi

### **PENDAHULUAN**

Pembelajaran sejarah memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kesadaran kritis peserta didik. Sebagai mata pelajaran yang menelaah peristiwa masa lalu, sejarah bukan hanya menyampaikan kronologi peristiwa, tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial, budaya, politik, dan kemanusiaan yang relevan dengan kehidupan masa kini. Salah satu nilai penting yang mulai menjadi sorotan dalam pendidikan sejarah adalah kesetaraan gender, yaitu perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan.

Selama berabad-abad, narasi sejarah yang dominan dalam kurikulum cenderung berpusat pada tokoh laki-laki, peperangan, dan struktur kekuasaan yang patriarkis. Sementara itu, peran perempuan sering kali direduksi atau bahkan diabaikan dalam pembelajaran sejarah. Hal ini menciptakan representasi yang timpang dan berpotensi membentuk pola pikir siswa bahwa peran laki-laki lebih dominan dalam sejarah bangsa. Padahal, dalam realitas historis, perempuan memiliki kontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan, perkembangan budaya, dan perubahan sosial di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam tokoh-tokoh seperti R.A. Kartini, Cut Nyak Dien, Dewi Sartika, dan lainnya.

Implementasi nilai-nilai kesetaraan gender dalam pembelajaran sejarah menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap pendidikan yang adil dan inklusif. Pendidikan yang sensitif terhadap gender tidak hanya bertujuan untuk mengoreksi ketimpangan historis dalam penyampaian materi, tetapi juga untuk membentuk sikap siswa agar menghargai peran laki-laki dan perempuan secara setara dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, guru sejarah memiliki tanggung jawab tidak hanya menyampaikan fakta historis, tetapi juga mengembangkan perspektif kritis siswa terhadap ketidakadilan gender di masa lalu dan masa kini.

Di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), siswa berada dalam masa perkembangan identitas dan pembentukan nilai-nilai sosial yang akan memengaruhi sikap mereka di masa depan. Dalam konteks ini, pembelajaran sejarah yang mengintegrasikan nilai-nilai kesetaraan gender dapat menjadi media efektif untuk menanamkan sikap egaliter, toleran, dan adil terhadap perbedaan gender. Melalui materi yang berimbang dan reflektif, siswa dapat diajak untuk memahami bahwa sejarah tidak hanya milik satu jenis kelamin, melainkan hasil dari kontribusi bersama berbagai kelompok masyarakat, termasuk perempuan.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa upaya implementasi kesetaraan gender dalam pembelajaran sejarah masih menghadapi berbagai tantangan. Kurikulum nasional belum sepenuhnya memberikan ruang yang

proporsional bagi narasi perempuan. Buku teks sejarah pun masih minim menampilkan peran dan kontribusi tokoh-tokoh perempuan secara setara. Selain itu, persepsi dan pemahaman guru terhadap konsep kesetaraan gender sering kali terbatas, yang berdampak pada rendahnya integrasi nilai tersebut dalam proses pembelajaran. Pendidikan merupakan instrumen fundamental dalam membentuk karakter dan pola pikir generasi muda. Melalui proses pendidikan, nilai-nilai kehidupan dapat ditanamkan secara sistematis, termasuk nilai keadilan, demokrasi, kemanusiaan, dan kesetaraan gender. Salah satu mata pelajaran yang strategis dalam menanamkan nilai-nilai tersebut adalah mata pelajaran sejarah, karena sejarah tidak hanya mengajarkan kronologi peristiwa masa lalu, tetapi juga membentuk cara pandang siswa terhadap realitas sosial, politik, dan budaya masyarakat.

Dalam konteks pembelajaran sejarah di Sekolah Menengah Atas (SMA), terdapat tantangan besar dalam menghadirkan narasi yang adil dan inklusif. Penelitian menunjukkan bahwa narasi sejarah yang diajarkan di sekolah sering kali berpusat pada tokoh laki-laki, dengan mengabaikan atau meminimalkan kontribusi perempuan dalam perjalanan bangsa. Materi yang dominan bersifat maskulin ini secara tidak langsung mengonstruksi pandangan bahwa laki-laki lebih berperan penting dalam sejarah, sedangkan perempuan hanya menempati posisi marginal. Ketimpangan representasi ini tidak hanya mencerminkan bias sejarah, tetapi juga berpotensi membentuk sikap siswa yang tidak sensitif terhadap isu kesetaraan gender.

Padahal, dalam realitas historis, perempuan memiliki peran signifikan dalam berbagai peristiwa penting di Indonesia, baik dalam perjuangan kemerdekaan, pergerakan sosial, pendidikan, maupun pembangunan bangsa. Tokoh-tokoh seperti Cut Nyak Dien, Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika, Christina Martha Tiahahu, hingga Siti Walidah Ahmad Dahlan adalah contoh nyata kontribusi perempuan dalam sejarah bangsa yang seharusnya mendapatkan tempat yang proporsional dalam pembelajaran sejarah.

Kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dalam pendidikan mulai mendapat perhatian secara global. Lembaga-lembaga internasional seperti UNESCO dan UN Women mendorong integrasi nilai-nilai gender dalam kurikulum, termasuk dalam pengajaran sejarah. Di Indonesia, berbagai kebijakan telah dilahirkan untuk mendukung pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) di sektor pendidikan. Namun, dalam praktiknya, implementasi nilai-nilai kesetaraan gender di ruang kelas masih menemui hambatan, baik dari sisi materi, metode, maupun pemahaman guru.

Guru sebagai fasilitator pembelajaran memiliki peran krusial dalam menentukan apakah nilai-nilai kesetaraan gender dapat diinternalisasi oleh siswa. Melalui strategi pembelajaran yang inklusif dan reflektif, guru dapat mengajak siswa untuk mengkaji peran laki-laki dan perempuan secara kritis dalam sejarah, sekaligus mendorong siswa untuk mengembangkan sikap menghargai perbedaan dan menjunjung keadilan gender dalam kehidupan sehari-hari.

Namun demikian, berbagai penelitian dan pengamatan menunjukkan bahwa masih banyak guru sejarah yang belum memiliki kompetensi dan perspektif gender yang memadai. Hal ini mengakibatkan penyampaian materi sejarah sering kali bias, tidak berimbang, dan tanpa kesadaran kritis. Siswa pun menjadi kurang mendapatkan stimulasi untuk berpikir kritis terhadap relasi gender dalam sejarah maupun dalam masyarakat masa kini. Situasi ini tentu mengkhawatirkan karena pendidikan seharusnya menjadi ruang untuk membongkar ketidakadilan, bukan mereproduksi ketimpangan.

Pendidikan sejarah memainkan peranan krusial dalam membentuk cara berpikir generasi muda terhadap peristiwa masa lampau, pembentukan jati diri bangsa, serta nilai-nilai sosial yang dijunjung dalam masyarakat. Namun, dalam realitasnya, penyampaian sejarah di lingkungan pendidikan masih didominasi oleh sudut pandang laki-laki dan cenderung mengesampingkan peran serta kontribusi perempuan. Ketimpangan ini tercermin dalam buku ajar, struktur kurikulum, dan pendekatan pengajaran yang masih dibayangi oleh budaya patriarkal yang mengakar kuat.

Isu kesetaraan gender dalam pengajaran sejarah tidak hanya terbatas pada hadirnya tokoh-tokoh perempuan dalam konten pembelajaran, melainkan juga menyangkut cara pandang terhadap sejarah itu sendiri—bagaimana ia dikaji, ditafsirkan, dan diajarkan secara menyeluruh dan inklusif. Pendekatan gender dalam pendidikan sejarah membuka peluang bagi siswa untuk memahami bahwa sejarah tidak hanya diciptakan oleh dan untuk laki-laki, tetapi juga melibatkan perempuan serta kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan sebagai bagian penting dari proses sejarah.

Oleh karena itu perlu adanya peninjauan ulang terhadap pendekatan pedagogis dalam pendidikan sejarah di sekolah. Perspektif gender seharusnya tidak diposisikan sebagai pelengkap, melainkan dijadikan sebagai kerangka berpikir utama yang mampu memperluas wawasan kritis dan keadilan dalam pemahaman sejarah. Melalui cara ini, pendidikan sejarah yang sensitif terhadap isu gender dapat berkontribusi pada terwujudnya tatanan masyarakat yang lebih setara dan berkeadilan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan model penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan studi literatur dan untuk penelitian ini instrument penelitiannya menggunakan angket dan wawancara mendalam terkait dengan kesetaraan gender dalam pembelajaran sejarah menggunakan uji T dengan one sample t tes dan menggunakan kuasi eksperimen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode studi literatur sebagai landasan teoritis utama. Untuk mengumpulkan data empiris, digunakan instrumen berupa angket dan wawancara mendalam yang dirancang untuk menggali persepsi dan praktik terkait kesetaraan gender dalam pembelajaran sejarah.

Analisis data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan uji-t (One Sample t-Test) untuk mengetahui signifikansi perbedaan antara data yang diperoleh dan nilai standar yang ditentukan. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan desain kuasi-eksperimen, guna melihat pengaruh perlakuan tertentu dalam pembelajaran sejarah terhadap pemahaman siswa mengenai isu kesetaraan gender. Desain kuasi-eksperimen ini memungkinkan peneliti untuk melakukan perbandingan antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol secara terbatas, meskipun tanpa pengacakan penuh (randomisasi).

Dengan kombinasi pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi nilai-nilai kesetaraan gender dalam pembelajaran sejarah, baik secara teoritis maupun praktis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah merupakan bagian penting dalam kehidupan yang senantiasa dapat diimplementasikan dalam kehidupan dengan baik. Kesetaraan gender merujuk pada kondisi di mana perempuan dan laki-laki memperoleh hak, tanggung jawab, serta kesempatan yang setara dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, dunia kerja, politik, keluarga, dan interaksi sosial. Kesetaraan ini tidak dimaksudkan untuk menyamakan peran antara laki-laki dan perempuan sepenuhnya, melainkan memastikan bahwa akses terhadap hak, tanggung jawab, dan peluang tidak ditentukan oleh jenis kelamin.

### 1. Pengertian Gender dan Kesetaraan Gender

Istilah "gender" berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Dalam kamus Webster's New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku. Sementara itu, Women's Studies Encyclopedia menjelaskan bahwa gender adalah konstruksi budaya yang

berusaha membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana berkembang di masyarakat.

Menurut Hillary M. Lips, gender mencerminkan harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (cultural expectations for men and women). Pendapat ini sejalan dengan pandangan feminis seperti Lindsey, yang menilai bahwa semua norma masyarakat yang menentukan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan merupakan bagian dari kajian gender (what a given society defines as masculine or feminine).

H.T. Wilson dalam *Sex and Gender* menyatakan bahwa gender adalah dasar untuk memahami pengaruh budaya dan kehidupan kolektif dalam membedakan laki-laki dan perempuan. Showalter juga menekankan bahwa gender bukan hanya tentang perbedaan sosial-budaya antara laki-laki dan perempuan, melainkan merupakan konsep analisis yang membantu memahami berbagai fenomena sosial.

Dengan demikian, gender dan seks memiliki perbedaan mendasar. Seks adalah sifat biologis, sedangkan gender terbentuk oleh proses sosial dan budaya. Gender lebih menyoroti aspek maskulinitas dan feminitas yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Gender merupakan hasil konstruksi yang disosialisasikan, diperkuat, dan dilegitimasi melalui norma sosial dan budaya.

## 2. Konsep Kesetaraan Gender

Studi gender berfokus pada maskulinitas dan feminitas yang dilekatkan pada individu berdasarkan konstruksi sosial. Perbedaan jenis kelamin kemudian melahirkan perbedaan gender, yang kerap memunculkan berbagai bentuk ketidakadilan.

Kesetaraan gender berarti tercapainya kondisi yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak dan kesempatan untuk berperan dalam pembangunan di berbagai bidang: politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, serta pertahanan dan keamanan. Konsep ini juga disebut sebagai kesetaraan seksual, yang menghendaki agar tidak ada diskriminasi atas dasar jenis kelamin kecuali karena alasan biologis.

Gerakan feminisme berupaya menyetarakan kedudukan perempuan dan laki-laki. Dalam konteks luas, feminisme menolak segala bentuk marginalisasi, subordinasi, dan pelecehan terhadap perempuan yang dilanggengkan oleh budaya dominan, baik di ranah politik, ekonomi, maupun sosial. Menurut *The New Encyclopedia of Britannica*, feminisme adalah keyakinan—yang banyak berasal dari Barat—mengenai kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik antara laki-laki dan perempuan, dan diwujudkan oleh berbagai lembaga yang memperjuangkan hak serta kepentingan perempuan.

Al-Qur'an menolak segala bentuk penindasan dan menyerukan keadilan, kebaikan, serta kebersamaan. Oleh karena itu, pemahaman dan praktik sosial yang menyudutkan perempuan harus dikaji ulang, agar nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang terkandung dalam ajaran Islam benar-benar terwujud.

### 3. Kesetaraan Gender dalam Pembelajaran Sejarah

Masa sebelum peradaban hingga masa Abad Pertengahan

Pada masa ini manusia lebih banyak menganut sistem Patriarki yang lebih menempatkan laki laki sebagai pemegang kekuasaan utama. Meskipun demikian, perempuan tidak sepenuhnya kehilangan peran penting. Dalam beberapa komunitas seperti Minangkabau dan Iroquois, perempuan memiliki pengaruh dalam struktur keluarga dan pewarisan. Namun secara umum: Perempuan dianggap lebih rendah dibandingkan laki-laki, kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan, menjadi pemimpin, atau mewarisi harta sangat terbatas. norma-norma agama dan budaya memperkuat ketimpangan peran gender.

Masa Pencerahan dan Revolusi (Abad ke-17 hingga ke-19)

Di Era ini ditandai oleh berkembangnya ide-ide tentang akal, kebebasan, dan hak asasi manusia.

1. Mary Wollstonecraft menerbitkan *A Vindication of the Rights of Woman* pada 1792, yang menjadi landasan awal pemikiran feminisme modern.
2. Meskipun Revolusi Prancis dan Amerika memperjuangkan kesetaraan, hak-hak perempuan tetap terpinggirkan.

3. Perempuan mulai menuntut akses terhadap pendidikan dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan publik.

Gelombang pertama Feminisme (akhir abad ke 19 hingga awal abad ke 20 dimulai oleh :

- Tokoh penting antara lain Emmeline Pankhurst dan Susan B. Anthony.
- Perempuan menuntut hak politik, pendidikan, serta reformasi hukum keluarga.
- Beberapa negara mulai memberikan hak suara kepada perempuan, seperti Selandia Baru (1893), Inggris (1918), dan Amerika Serikat (1920).

Gelombang Kedua Feminisme (1950 – 1980) perjuangan lebih berfokus pada domestik, pekerjaan dan hukum Tokoh penting seperti Simone de Beauvoir (*The Second Sex*, 1949) dan Betty Friedan (*The Feminine Mystique*, 1963) menjadi pemicu kesadaran perempuan modern.

Isu utama mencakup diskriminasi di dunia kerja, hak atas tubuh dan reproduksi, serta kekerasan dalam rumah tangga.

Konsep gender dikenalkan sebagai konstruksi sosial, bukan sekadar perbedaan biologis.

Lahir pula kebijakan internasional

Gelombang Ketiga dan Keempat Feminisme (1990-an hingga Sekarang)

Feminisme memasuki tahap yang lebih terbuka dan beragam.

Menerima berbagai latar belakang seperti ras, kelas sosial, orientasi seksual, dan budaya non-Barat.

Menekankan interseksionalitas, yaitu keragaman pengalaman perempuan yang saling bersinggungan.

Masa Kolonial dan Kebangkitan Nasional

Tokoh seperti R.A. Kartini, Dewi Sartika, dan Maria Walanda Maramis menjadi pelopor pendidikan perempuan dan kesetaraan hak. Mereka mengkritik tradisi serta tafsir agama yang membatasi perempuan. Kartini dikenal dengan pemikirannya yang dituangkan dalam kumpulan buku yang berjudul *Habis Gelap Terbitlah Terang*.

Menghilangkan perlakuan tidak adil berdasarkan jenis kelamin di lingkungan keluarga, tempat kerja, dunia pendidikan, dan masyarakat luas.

Menjamin bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki peluang yang sama tanpa diskriminasi gender.

#### 4. Tujuan Kesetaraan Gender

##### a. Menyediakan Kesempatan Setara dalam Pendidikan dan Karier

Menjamin bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan dan pekerjaan sesuai bakat dan kemampuan mereka.

Mencegah putus sekolah akibat anggapan atau peran gender yang membatasi.

b. Mendorong Keterlibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan  
Memperluas kehadiran perempuan di sektor politik, ekonomi, dan kepemimpinan agar kebijakan yang dihasilkan lebih adil dan representatif.

Menguatkan peran serta perempuan dalam ruang-ruang strategis.

##### c. Memperkuat Ekonomi Keluarga dan Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi perempuan berdampak positif pada kehidupan keluarga dan pembangunan masyarakat.

Menekan kesenjangan penghasilan antara laki-laki dan perempuan.

##### d. Menjamin Hak atas Kesehatan dan Perlindungan Diri

Memberikan akses yang adil terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman.

Menghapus segala bentuk kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual.

##### e. Mengubah Pola Pikir dan Norma Gender yang Merugikan

Mendorong masyarakat untuk meninggalkan pola pikir tradisional yang membatasi peran gender.

Membangun budaya yang menghargai kesetaraan peran antara perempuan dan laki-laki.

##### f. Mendukung Agenda Pembangunan Berkelanjutan

Kesetaraan gender merupakan bagian penting dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGS), khususnya tujuan ke-5.

Tanpa kesetaraan gender, pertumbuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan akan terhambat.

## KESIMPULAN

Kesetaraan gender dalam pendidikan, khususnya pada pembelajaran sejarah, merupakan kebutuhan mendasar yang tidak boleh dianggap sebagai isu tambahan, melainkan harus dijadikan kerangka utama dalam praktik pedagogis. Walaupun berbagai kebijakan internasional maupun nasional telah mendorong pengarusutamaan gender, realisasinya di ruang kelas masih menghadapi hambatan yang cukup serius, terutama berkaitan dengan keterbatasan pemahaman guru, adanya bias dalam bahan ajar, serta kuatnya dominasi perspektif patriarkal.

Guru sebagai tokoh kunci dalam proses pendidikan memiliki peran penting dalam menciptakan pembelajaran yang inklusif, reflektif, dan kritis, sehingga siswa dapat menilai relasi gender dalam sejarah secara lebih adil. Namun, kurangnya kompetensi serta perspektif gender di kalangan pendidik membuat pengajaran sejarah masih sering menyingkirkan peran perempuan dan kelompok marginal. Kondisi ini pada akhirnya berkontribusi pada pelestarian ketidakadilan gender dalam kesadaran generasi muda.

Oleh karena itu perlu adanya perubahan mendasar dalam pendekatan pedagogis pada pendidikan sejarah. Integrasi perspektif gender tidak cukup hanya dengan menambahkan tokoh-tokoh perempuan dalam materi ajar, melainkan harus mencakup perubahan cara pandang terhadap sejarah itu sendiri sebagai sebuah disiplin ilmu. Melalui pembelajaran sejarah yang sensitif gender, siswa tidak hanya memperoleh pemahaman yang seimbang mengenai peran laki-laki dan perempuan, tetapi juga menumbuhkan nilai keadilan, penghargaan terhadap keberagaman, serta kesadaran kritis untuk menantang struktur ketidaksetaraan dalam masyarakat. Dengan demikian, pendidikan sejarah yang berperspektif gender dapat menjadi

sarana strategis untuk membangun masyarakat yang lebih setara, demokratis, dan berkeadilan sosial.

## REFERENSI

Ahmad, A., Mahmood, Q. K., Saud, M., & Mas'udah, S. (2019). Women in democracy: The political participation of women. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 32(2), 114–122. <https://doi.org/10.20473/mkp.V32I22019.114-122>

Akchurin, M., & Lee, C.-S. (2013). Pathways to empowerment: Repertoires of women's activism and gender earnings equality. *American Sociological Review*, 78(4), 679–701. <https://doi.org/10.1177/0003122413494759>

Arifin, S. (2020). Kesetaraan gender dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Kajian*, 23(1), 27–42. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/1872>

Audina, D. J. (2022). Kesetaraan gender dalam perspektif hak asasi manusia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(6), 148–154. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602>

Aziz, A., Shams, M., & Khan, K. S. (2011). Participatory action research as the approach for women's empowerment. *Action Research*, 9(3), 303–323. <https://doi.org/10.1177/1476750310396952>

Biswas, T. K., & Kabir, M. (2004). Measuring women's empowerment: Indicators and measurement techniques. *Social Change*, 34(3), 64–77. <https://doi.org/10.1177/004908570403400305>

Blanton, S. L., Peksen, D., & Blanton, R. (2023). The impact of peacekeeping missions on women's empowerment. *Political Research Quarterly*, 76(4), 1872–1887. <https://doi.org/10.1177/10659129231181594>

Cameron, L. (2023). Gender equality and development: Indonesia in a global context. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(2), 179–207. <https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2229476>

Cornwall, A., & Rivas, A.-M. (2015). From “gender equality” and “women’s empowerment” to global justice: Reclaiming a transformative agenda for gender and development. *Third World Quarterly*, 36(2), 396–415. <https://doi.org/10.1080/01436597.2015.1013341>

Davies, S. E. (2018). Gender empowerment in the health aid sector: Locating best practice in the Australian context. *Australian Journal of International Affairs*, 72(5), 520–534. <https://doi.org/10.1080/10357718.2018.1534938>

Elder-Vass, D. (2017). [Review of the book Religion, gender and citizenship: Women of faith, gender equality and feminism]. *The Sociological Review*, 65(2), 429–431. <https://doi.org/10.1177/0038026117701343>

Evans, C. A., Mayo, L. M., & Quijada, M. A. (2018). Women’s empowerment and nonprofit sector development. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 47(4), 856–871. <https://doi.org/10.1177/0899764018764331>

Fielding-Miller, R., Hatcher, A. M., Wagman, J., Swendeman, D., & Upadhyay, U. D. (2020). Gender, justice and empowerment: Creating the world we want to see. *Culture, Health & Sexuality*, 22(sup1), 1–12. <https://doi.org/10.1080/13691058.2020.1736843>

Foucault, M. (1977). *Discipline and punish: The birth of the prison*. Vintage Books.

Holmarsdottir, H. B., Ekne, I. B. M., & Augestad, H. L. (2011). The dialectic between global gender goals and local empowerment: Girls’ education in Southern Sudan and South Africa. *Research in Comparative and International Education*, 6(1), 14–26. <https://doi.org/10.2304/rcie.2011.6.1.14>

- Isin, E., & Turner, B. (2002). *Handbook of citizenship studies*. Sage.
- Iwanaga, K. (2008). *Women's political participation and representation in Asia: Obstacles and challenges*. NIAS Press.
- Kabbani, N. S., & Arslan, A. S. (2019). *Investing in rural youth in the Near East, North Africa, Europe and Central Asia*. Rural Development Report.
- Kent, C. (2016). *Surveying and being surveyed: Gender aspects in John Berger's Ways of Seeing*. In H. Ralf & M. David (Eds.), *On John Berger* (pp. 211–232). BRILL.
- Kirton, G. (2021). *Union framing of gender equality and the elusive potential of equality bargaining in a difficult climate*. *Journal of Industrial Relations*, 63(4), 591–613. <https://doi.org/10.1177/00221856211003604>
- Klasen, S., & Lamanna, F. (2009). *The impact of gender inequality in education and employment on economic growth: New evidence for a panel of countries*. *Feminist Economics*, 15(3), 91–132. <https://doi.org/10.1080/13545700902893106>
- Kriyantono, R., Ida, R., Tawakkal, G. T. I., & Safitri, R. (2022). *Not just about representation: When democracy needs females and their competency to run Indonesian government public relations to management level*. *Heliyon*, 8(8), e08714. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e08714>
- McGinley, A. C. (2008). *Hillary Clinton, Sarah Palin, and Michelle Obama: Performing gender, race, and class on the campaign trail*. *Denver University Law Review*, 86, 709–740. <https://scholars.law.unlv.edu/facpub/171/>
- Mitander, T. (2024). *Undoing the regional demos? Gender equality and economic growth in regional development*. *NORA: Nordic Journal of Feminist*

- and Gender Research, 32(1), 49–61.  
<https://doi.org/10.1080/08038740.2023.2201474>
- Mulvey, L. (1975). Visual pleasure and narrative cinema. *Screen*, 16(3), 6–18.  
<https://doi.org/10.1093/screen/16.3.6>
- Orfan, S. N., & Samady, S. (2023). Students' perceptions of gender equality: A case study of a conflict-stricken country. *Cogent Social Sciences*, 9(1), 2225819. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2225819>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71.  
<https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Panday, P. (2020). Women's empowerment and the well-being of children in Nepal. *Journal of Developing Societies*, 36(2), 129–154.  
<https://doi.org/10.1177/0169796X20916048>
- Patel, T., Romani, L., Oberoi, P., & Ramasamy, C. (2023). Gender role encapsulation as resistance to patriarchy: Women politicians' work and gender equality in India. *Organization*, 30(2), 307–325.  
<https://doi.org/10.1177/1350508421995764>
- PCAR. (2013). Sex, gender, gender expression, and gender identity biological sex.  
<http://www.uta.edu/english/timothy/Fausto-Sterling>
- Pervaiz, Z., Akram, S., Ahmad Jan, S., & Chaudhary, A. R. (2023). Is gender equality conducive to economic growth of developing countries? *Cogent Social Sciences*, 9(1), 2266815.  
<https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2266815>